No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
10.	**Lingkungan Hidup**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**	**1. Peningkatan Kualitas Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga 2. Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis 3. Peningkatan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam RTRW sebagai Fungsi Lindung 4. Penegakan Perlindungan Ekosistem Gambut Lindung 5. Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang baik 6. Peningkatan Kepatuhan/Kesadaran Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA 7. Peningkatan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**		**690.000.000,00**	**664.408.824,00**			
				I. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	**Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu**	**110.000.000,00**	**100.555.022,00**			
				A. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	***Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi yang ditetapkan***	110.000.000,00	100.555.022,00			
				1. Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	110.000.000,00	100.555.022,00	Tidak ada permasalahan dari 7 (tujuh) DPPT yang disampaikan kepada Bapak Gubernur telah ditindaklanjuti dengan Pendelegasian ke Bupati/Walikota Selanjutnya terkait lahan PSN telah dukungan percepatan baik berupa surat maupun rapat-rapat	-	
				II PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan**	**90.000.000,00**	**88.550.600,00**			
				A. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	***Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi***	90.000.000,00	88.550.600,00			
				1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.000.000,00	88.550.600,00	Belum terdapat SDM PNS yang memenuhi sebagai mediator;	Menambahkan SDM PNS yang memenuhi sebagai mediator;	
								Masih terdapat pihak ketiga yang menjadi provokator sehingga menghambat penyelesaian sengketa pertanahan;	Dengan menjalankan regulasi yang sudah ada;	
								Terdapat regulasi dalam dunia usaha/kegiatan yang melarang ganti rugi lahan di luar IUP.	Menyesuaikan regulasi yang ada di dunia usaha/kegiatan.	
				III PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**120.000.000,00**	**114.188.900,00**			
				A. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	***Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	120.000.000,00	114.188.900,00			
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	40.000.000,00	37.564.670,00	Telah dilakukan penelitian dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap klaim lahan oleh masyarakat namun terkendala dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan klaim lahan yang telah dihibahkan ke pihak lain	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk solusi penyelesaian	
				2. Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80.000.000,00	76.624.230,00	Tidak ada permasalahan, telah dilaksanakan realisasi pembayaran terhutang jasa penilai Tahun 2023.	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				IV PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**200.000.000,00**	**196.999.039,00**			
				A. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	***Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	200.000.000,00	196.999.039,00	1. Ketidaksesuaian antara tujuan peraturan dengan pelaksanaannya 2. Kendala administratif 3. Kurangnya partisipasi masyarakat 4. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis 5. Potensi konflik kepentingan 6. Tahapan redistribusi tanah yang belum seragam	1. Menentukan penerima redistribusi tanah yang tepat sasaran 2. Memberikan sanksi bagi penerima redistribusi tanah yang melanggar ketentuan 3. Mengantisipasi potensi konflik kepentingan 4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi tanah. 5. Memberdayakan masyarakat melalui program-program terkait dengan pemberdayaan masyarakat	Perlu adanya upaya untuk melakukan percepatan reforma agraria. Reforma agraria merupakan program pemeritah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi	200.000.000,00	196.999.039,00			
				V PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Terkelolanya Tanah Kosong**	**170.000.000,00**	**164.115.263,00**			
				A. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	***Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong***	170.000.000,00	164.115.263,00			
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	170.000.000,00	164.115.263,00	Tidak ada permasalahan, kegiatan koordinasi dan konsultasi pengelolaan tanah kosong masih dalam tahap pendataan.	a.Perlu konsultasi ke pemerintah pusat untuk petunjuk teknis yang jelas. b.Diperlukan pembentukan tim yang efektif agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan melibatkan instansi teknis. c.Objek tanah kosong yang akan dikelola harus diinventarisir terlebih dahulu.	Setelah melaksanakan program kegiatan pengelolaan tanah kosong dalam 1 wilayah dalam provinsi upaya yang dilakukan yaitu pada Tahun 2024 akan dilanjutkan dengan menginventarisasi tanah kosong yang bertujuan untuk pengamanan dan pemanfataan lebih lanjut terhadap lahan dan tanah kosong di kawasan reklamasi Jakabaring.
				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		**51.079.455.673,00**	**49.523.435.231,00**			
				I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**47.096.892.490,00**	**45.697.200.922,00**			
				A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	324.338.417,00	312.816.487,00			
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.776.975,00	53.163.912,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.055.075,00	79.451.675,00			
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.506.367,00	180.200.900,00			
				B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	11.107.469.223,00	11.055.073.095,00			
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	10.824.549.223,00	10.783.258.649,00			
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.920.000,00	222.720.000,00			
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.094.446,00			
				C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	***Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan baik***	18.000.000,00	12.163.600,00			
				1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000,00	4.322.400,00			
				2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	6.000.000,00	5.346.400,00			
				3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	2.494.800,00			
				D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	40.000.000,00	38.856.123,00			
				1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000,00	38.856.123,00			
				E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	1.556.426.094,00	808.162.946,00			
				1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12.000.000,00	11.892.000,00			
				2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Peralatan Kantor	131.600.000,00	120.353.180,00			
				3. Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	39.829.500,00			
				4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	14.944.000,00			
				5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	26.583.102,00			
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.147.826.094,00	430.941.125,00			
				7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	18.796.503,00			
				8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00	144.823.536,00			
				F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	123.350.000,00	123.330.000,00			
				1. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	73.350.000,00	73.350.000,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.980.000,00			
				G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	1.445.748.000,00	1.391.422.078,00			
				1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.000.000,00			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.000.000,00	305.318.778,00			
				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.929.400,00			
				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.085.748.000,00	1.079.173.900,00			
				H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	795.089.633,00	718.391.808,00			
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.880.000,00			
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	485.520.000,00	411.465.175,00			
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.569.633,00	277.046.633,00			
				I. Peningkatan Pelayanan BLUD	***Meningkatnya Pelayanan BLUD***	31.686.471.123,00	31.236.984.785,00			
				1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	31.686.471.123,00	31.236.984.785,00	Menurunnya jumlah sampel yang akan melakukan pengujian di laboratorium	Perlu adanya sosialisasi terhadap pelanggan baru (dunia usaha, masyarakat, dan instansi pemerintah)	
				II PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**270.000.000,00**	**269.215.572,00**			
				A. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	***Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi***	270.000.000,00	269.215.572,00			
				1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD	270.000.000,00	269.215.572,00	Adanya perubahan nomenklatur di KLHK dan perubahan dasar hukum penyusunan KLHS sehingga dilakukan penyesuaian mekanisme sistematika penyusunan seperti analisa data-data substansi KLHS dan TPB	Berkoordinasi atau asistensi ke KLHK dan OPD Prov terkait untuk penyesuaian sistematika penyusunan sesuai dasar hukum terbaru	Mendorong OPD Prov untuk melaksanakan capaian TPB sesuai target yang telah ditetapkan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				III PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Persentase Penurunan Emisi GRK**	**1.952.927.400,00**	**1.883.878.297,00**			**Rekomendasi:** Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik-pabrik dan industri pengelolaan bahan baku karet dan sawit yang tidak sesuai Tata Ruang Kota sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. **Tanggapan:** DLHP sebagai instansi untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup salah satunya merekomendasi kelayakan lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sesuai PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 21 bahwa Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mengajukan penyusunan AMDAL wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian iokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diperoleh melalui Online Single Submission (OSS) yaitu Perizinan Berusaha ,Terintegrasi Secara Elektronik. Jika tidak sesuai dengan KPPR maka pengajuan penyusunan AMDAL dikembalikan ke usaha/kegiatan.
				A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	***Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	1.406.727.400,00	1.350.748.013,00			
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	280.000.000,00	277.395.963,00			
				2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	645.000.000,00	601.340.818,00			
				3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	481.727.400,00	472.011.232,00			
				B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	***Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	240.000.000,00	238.251.862,00			
				1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota	240.000.000,00	238.251.862,00	Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.	Telah dilaksanakan koordinasi ke DLH kabupaten/kota untuk dapat mensosialisasikan ke masyarakat kabupaten/kota.	
				C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	***Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	306.200.000,00	294.878.422,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	306.200.000,00	294.878.422,00	Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup yang begitu dinamis.	Mengidentifikasi pelaku usaha yang mengalami perubahan kewenangan dan strategi inisiasi terhadap perubahan peraturan.	
								Kekurangan anggaran untuk perjalanan dinas monitoring ke kabupaten/ kota akibat efisiensi	Mengubah strategi dan target sasaran kabupaten/kota yang akan dilakukan monitoring	
				IV PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan**	**264.950.000,00**	**207.024.101,00**			
				A. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	***Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi***	264.950.000,00	207.024.101,00			
				1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	89.950.000,00	89.950.000,00			
				2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	75.000.000,00	57.706.858,00			
				3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00	59.367.243,00			
				V PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah Kab/ Kota**	**100.000.000,00**	**99.960.998,00**			
				A. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	***Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	100.000.000,00	99.960.998,00			
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, and/atau Penimbunan yang bukan kewenangan Provinsi serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Provinsi yang sesuai kewenangannya.	100.000.000,00	99.960.998,00	Pihak pelaku usaha masih kurang dalam pengelolaan limbah B3 baik dalam penyimpanan dan pengumpulan skala provinsi dalam perihal keterbatasan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait, baik di tingkat provinsi maupun lintas provinsi, serta peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat, adalah kunci utama dalam mengatasi permasalahan pengelolaan limbah B3 di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara efisien, aman, dan ramah lingkungan.	
				VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**200.000.000,00**	**198.092.919,00**			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				A. Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	200.000.000,00	198.092.919,00			
				1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	198.092.919,00			
				VII PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**30.000.000,00**	28.096.770,00			
				A. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	***Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan***	30.000.000,00	28.096.770,00			
				1. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terinventarisasinya Masyarakat Hukum Adat	30.000.000,00	28.096.770,00	Ada beberapa kabupaten yang belum mendata lembaga masyarakat bidang lingkungan hidup.	Telah dilaksanakan koordinasi ke kabupaten/kota untuk dapat mendata lembaga tersebut.	
				VIII PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**259.000.000,00**	**252.974.045,00**			
				A. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	***Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi***	259.000.000,00	252.974.045,00			
				1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	60.000.000,00	56.435.500,00			
				2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	199.000.000,00	196.538.545,00			
				IX PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**556.000.000,00**	**549.431.009,00**			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				A. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	***Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi***	556.000.000,00	549.431.009,00			
				1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	556.000.000,00	549.431.009,00	Penyusunan IKPLHD: Beberapa OPD tidak menyampaikan data yang diminta untuk mendukung analisa kinerja pengelolaan LH sehingga Analisa tidak detail	Terus berkoordinasi dengan OPD terkait pengumpulan data dan menyampaikan surat Gubernur permohonan data	Mendorong OPD untuk menyampaikan data yang dibutuhkan
								Tidak semua kab/kota melaksanakan penyusunan IKPLHD dikarenakan tidak ada anggaran, minimnya data dan SDM yang berkompeten	Melakukan pembinaan Kab/Kota untuk menyusun IKPLHD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja kepala daerah	Memberi arahan kab/kota untuk Menyusun IKPLHD dan mendukung anggaran urusan LH
				X PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan**	**201.260.783,00**	**191.066.528,00**			
				A. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	***Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi***	201.260.783,00	191.066.528,00			
				1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	201.260.783,00	191.066.528,00			
				XI PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga**	**148.425.000,00**	**146.494.070,00**			
				A. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	***Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional***	148.425.000,00	146.494.070,00			
		-		1. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	148.425.000,00	146.494.070,00			
TOTAL						**51.769.455.673,00**	**50.187.844.055,00**			

Palembang, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan,

Hendi Apriansyah,S.STP,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001